



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
BAGIAN HUKUM

NOTULA

Rapat : Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Hari/Tanggal : Rabu / 9 Juli 2025  
Surat Undangan : HK.00.01/1177/SETDA/2025  
Waktu Rapat : 13.30 WIB s.d Selesai  
Acara : Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pimpinan Rapat

Ketua : Ida Lismawati, S.Sos., M.Si  
Sekretaris : Amrullah, S.H  
Pencatat : Ellen, S.H.  
Peserta Rapat : 1. Ida Lismawati;  
2. Amrullah;  
3. Erni Yusnita;  
4. Ifan Suryawan;  
5. Ira Elvia Kirana;  
6. Zuhri;  
7. Yuliati;  
8. Siti M;  
9. Ellen;  
10. Alfi Liana Wardaningsih;  
11. Vebry Ardiansih;  
12. L Rusli;  
13. Iran T;  
14. Lukman;  
15. Andry M. Wibowo;  
16. Suryani;  
17. Yuni Handayani;  
18. Febby Sandranita;  
19. Fitri Handayani;  
20. Siswadi;  
21. Subkhan Anshori  
22. Dion R;  
23. Zeba Marchelda; dan  
24. Taufik Wanhardi.

Kegiatan Rapat:

1. Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Amrullah, S.H (Kepala Bagian Hukum);
2. Selanjutnya Amrullah, S.H. memberikan kesempatan kepada Ibu Ida Lismawati untuk menyampaikan kata sambutan dan pengarahan sekaligus membuka rapat.
3. Pembahasan isi dari Raperbup ini dibacakan dan dipandu oleh Erni Yusnita, S.H. kemudian terdapat masukan dan saran dalam rapat ini yaitu:
  - Dinas Kesehatan dan RSUD Muhammad Zein meminta agar biaya dalam jenis pelayanan farmasi diakomodir dalam Peraturan Daerah ini, sedangkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan berdasarkan hasil evaluasi meminta dihapus.

- Bagian Hukum menanggapi bahwa apabila permintaan dari Dinkes dan RSUD diakomodir maka tidak sesuai dengan hasil evaluasi.
  - BPKAD akan meminta untuk berkomunikasi terlebih dahulu dengan Kemendagri terkait permintaan dari Dinkes dan RSUD.
  - Dinkes dan RS berkoordinasi dengan BPKPD sebelum paripurna.
  - Selanjutnya akan dilakukan komparasi dengan RS lain.
4. Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditutup.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH

Pembina Tk I, IV.b

NIP. 19710602 200604 1 005